

FOTO/ANT

## RAKER MENTERI BUMN DENGAN KOMISI VI DPR

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) memberikan paparan-paparan saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/7). Raker tersebut beragendakan pengambilan keputusan terhadap usulan BUMN penerima PMN 2023 dan Inisiatif Corporate Action 2022/ right issue 2022.



## APBN Diarahkan untuk Terus Menjaga Aktivitas Bisnis dan Daya Beli Masyarakat

“Dibandingkan dengan banyak negara di dunia, inflasi Indonesia masih tergolong moderat. Laju inflasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa terus mencatatkan rekor baru dalam 40 tahun terakhir, masing-masing mencapai 8,6 persen dan 8,8 persen,” ujar Febrio Kacaribu.

**JAKARTA (IM)** – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan sektor manufaktur Indonesia melanjutkan kinerja yang positif sebagaimana terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di bulan Juni yang masih berada pada zona ekspansif di level 50,2 (Mei 50,8).

Gejolak geopolitik serta perlambatan ekonomi dunia, mengganggu rantai pasok global dan menghambat laju ekspansi manufaktur Indonesia. Hal ini dialami juga oleh sebagian besar negara di kawasan

Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Thailand dan Filipina.

“Pemerintah akan terus memonitor dinamika dan prospek ekonomi global ke depan serta memitigasi berbagai dampak yang mungkin timbul. Berbagai instrumen yang ada, termasuk APBN, akan dioptimalkan untuk meminimalisasi dampaknya pada perekonomian domestik. Dengan demikian, momentum pemulihan ekonomi nasional terjaga,” kata Febrio, dilansir dari laman Kemenkeu, Senin (4/7).

Di sisi lain, Febrio men-

gungkapkan inflasi Indonesia pada Juni 2022 masih tergolong moderat dibandingkan dengan negara-negara lain. Adapun inflasi Juni 2022 masih terjaga di level 4,35 persen (year on year/yoy).

“Dibandingkan dengan banyak negara di dunia, inflasi Indonesia masih tergolong moderat. Laju inflasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa terus mencatatkan rekor baru dalam 40 tahun terakhir, masing-masing mencapai 8,6 persen dan 8,8 persen,” ujar Febrio.

Laju inflasi yang tinggi juga terjadi di sejumlah negara berkembang, seperti Argentina dan Turki, dengan inflasi masing-masing mencapai 60,7 persen dan 73,5 persen.

“Pemerintah, melalui instrumen APBN, berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga,” jelas Febrio.

Menanggapi hal tersebut,

pemerintah tetap terus memantau dan memitigasi berbagai faktor yang akan berpengaruh pada inflasi nasional, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Dalam hal inflasi di bulan Juni yang mengalami peningkatan, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak (*volatile food*) yang signifikan mencapai 10,07 persen (yoy) (Mei 6,05 persen).

Mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan, Pemerintah secara konsisten berupaya menjaga agar peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga pemulihan ekonomi.

Upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di antaranya melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng, perlakuan sementara ekspor CPO dan turunannya untuk menjaga pasokan dengan harga terjangkau, serta mempertahankan harga jual BBM, LPG, listrik (adminis-

tered price) tidak mengalami peningkatan.

“Ini semua diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga pangan pokok sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” kata Febrio.

Peran APBN 2022 sebagai shock absorber juga diimplementasikan dalam menjaga harga energi domestik agar tetap stabil melalui alokasi subsidi energi dan kompensasi yang mencapai Rp502,4 triliun.

“Subsidi dan kompensasi energi diberikan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Mengingat energi merupakan kebutuhan pokok, kebijakan subsidi energi ini vital bagi proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung,” tutup Febrio.\*\*\*



**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## Fasilitas KITE IKM Bantu Arus Kas Pelaku Usaha

**JAKARTA (IM)** – Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni membantu arus kas pelaku usaha.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bandung Eri Prihantari mengatakan hal tersebut disebabkan fasilitas KITE IKM meliputi penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga pembebasan bea masuk.

“Pembebasan bea masuk jika barang yang diimpor ada bea masuknya dan juga penangguhan PPN, jadi PPN tidak dibayar. Nanti kalau misalnya itu jadi diekspor ya udah langsung saldo nol, tapi kalau misalnya itu nanti untuk lokal itu harus bayar,” ungkap Eri di

laman Kemenkeu, Senin (4/7). Senada dengan yang disampaikan Eri, Direktur Utama PT Sinar Baru Rajawali (PT SBR) Adi Aris merasakan manfaat tersebut. Menurutnya, fasilitas KITE IKM dapat menambah arus kas dan meningkatkan kapasitas produksi usahanya.

“Sebelum mendapat fasilitas, setidaknya kami harus mengeluarkan 10 persen untuk PPN Impor. Jadi, begitu kami dapat fasilitas itu otomatis cashflow bertambah. Dengan demikian, kami bisa menaikkan kapasitas produksinya sebab kami bisa membeli bahan baku lebih banyak lagi,” jelas Adi.

Selain PT SBR, terdapat empat UMKM dan IKM yang turut memperoleh manfaat fasilitas KITE IKM dan berada di bawah bimbingan KPPBC Bandung. Keempatnya bergerak di bidang beragam mulai dari produksi alat musik, kerajinan, sulam, dan furnitur. • pan

## Hingga Mei, KEK Catat Transaksi Rp4,61 Triliun

**JAKARTA (IM)** - Sejak 13 tahun silam, Indonesia telah menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah.

Penyelenggaraan KEK ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Lebih lanjut, pemerintah melaksanakan reformasi KEK yang mengubah, menghapus dan menambahkan pengaturan baru yang bersifat strategis dalam pengembangan KEK melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaga Nasional Single Window (LNSW), Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), turut serta dalam pengembangan Sistem Aplikasi KEK yang digunakan untuk pelayanan dan pengawasan fasilitas KEK.

Sekretaris LNSW Muhamad Lukman mengatakan, hingga

Akhir Mei 2022, pemanfaatan penggunaan sistem Aplikasi KEK pada SINSW tercatat sebanyak 172 profil pelaku usaha sudah melakukan implementasi di semua Administrator KEK, terdapat 641 dokumen Pengajuan Pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK) dengan nilai transaksi mencapai Rp4,61 triliun.

“Sebanyak 251 dokumen permohonan masterlist sudah diimplementasikan di KEK Galang Batang, Sei Mangkei, Kendal, Gresik, Arun Lhokseumawe, dan Palu, serta terdapat 3.755 dokumen Permohonan Pabean KEK (PPKEK) yang sudah terimplementasi di Galang Batang, Kendal, Mandalika, dan Gresik,” ujar Lukman di Jakarta, Senin (4/7).

Dia menyebutkan, untuk mendapatkan fasilitas perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada KEK, badan usaha atau pelaku usaha di KEK dalam kegiatan pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang, wajib melalui sistem aplikasi KEK yang

dikembangkan oleh LNSW secara kolaboratif bersama Sekretariat Dewan Nasional KEK, Administrator KEK, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan Sistem INSW pada KEK pun telah dimulai pada 23 Februari 2021, dengan KEK Kendal sebagai pilot project implementasinya.

“Sistem Aplikasi KEK juga berperan dalam menunjang arah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Ini lantaran sistem tersebut dapat menghilangkan hambatan regulasi atau prosedur, mengintegrasikan sistem elektronik ekspor/impor, mendukung penguatan kelembagaan, menambah bidang usaha KEK nonindustri, serta memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha di KEK,” jelasnya.

Pada gilirannya, manfaat-manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, juga meningkatkan perekonomian daerah. • dot

## SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022



**KEGIATAN** Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Grand USSU, Cisarua, Bogor. Kegiatan dibuka oleh Plt. Bupati Bogor yaitu Iwan

1.APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah  
2.APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk

pada RKPDP  
5.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi  
6.APBD, Perubahan APBD dipertanggungjawabkan, pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
7.Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- Memperpendek dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat maupun sesama instansi pemerintah menjadi lebih cepat
- Mengurangi terjadinya resiko penyimpangan, baik dalam memahami tujuan organisasi maupun dalam pengelolaan sumber daya sebagai akibat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan
- Menyederhanakan proses koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi. (\*)



Setiawan, yang dalam pembukaan acara menyampaikan amanat terkait tata laksana pengelolaan keuangan daerah kepada para peserta, yang dihadiri oleh Sekretaris Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan dan Sub Koordinator Sub Bagian Program dan Pelaporan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

Narasumber kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor yaitu Drs. Burhanudin, M.Si dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yaitu Hilman Rosada, SAP, MAP. Resume materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah  
3.APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah  
4.APBD disusun dengan memedomani KUA PPAS yang didasarkan



## Revolusi Industri 4.0 Optimalikan Potensi Indonesia di Sektor Manufaktur

**JAKARTA (IM)** - Akselerasi revolusi industri 4.0 yang dicanangkan melalui Peta Jalan Making Indonesia 4.0 terus berjalan. Sektor manufaktur didorong bertransformasi menggunakan teknologi digital di seluruh rantai nilai industrinya.

Momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia yang memiliki keunggulan dalam hal kuatnya faktor permintaan, kerangka kelembagaan yang kuat, serta perdagangan dan investasi global yang baik.

“Perkembangan teknologi adalah keniscayaan dan pasti akan terjadi. Negara-negara yang menerapkan industri 4.0 meyakini pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang holistik sebagai pilar penting keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi digital,” kata Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Andi Rizaldi di Jakarta, dilansir dari laman Kemenperin, Senin (4/7).

Ia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi, dengan aspirasi besar membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia di tahun 2030. Resiliensi perekonomian Indonesia yang cukup baik juga dinilai sebagai

salah satu potensi yang dapat dioptimalkan lewat penerapan Industri 4.0. hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2019 dan kontraksi yang lebih kecil pada 2020 dibanding peer countries.

Potensi selanjutnya adalah menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik untuk mengakomodasi jumlah tenaga kerja yang besar. Revolusi Industri 4.0 tidak akan menghilangkan lapangan pekerjaan, melainkan menawarkan jenis pekerjaan baru yang memungkinkan migrasi dari satu profesi ke profesi lainnya.

“Nantinya akan ada pergeseran profesi seseorang ke arah lebih baik yang justru akan mengangkat harkat dari pekerja itu sendiri,” ujar Andi.

Dalam Making Indonesia 4.0, Kemenperin telah menetapkan tujuh sektor prioritas yakni makanan dan minuman, otomotif, kimia, tekstil dan produk tekstil, elektronika dan alat kesehatan. Ketujuh sektor ini dipilih karena dapat memberikan kontribusi sebesar 70 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, 65 persen ekspor manufaktur, dan 60 persen pekerja industri.

Proporsi tenaga kerja di tujuh sektor prioritas dalam program Making Indonesia 4.0 pada lima tahun terakhir menunjukkan tren

meningkat yang mana pada tahun 2015 sebesar 5,02 persen dan pada tahun 2020 sebesar 5,70 persen, meski sempat dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19.

Melihat data peningkatan tersebut, tentunya memberikan harapan bahwa adopsi teknologi di tujuh sektor prioritas berpotensi meningkatkan kapabilitas ekonomi nasional,” tuturnya.

Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara jumlah tenaga kerja terbanyak di dunia dengan jumlah 125 juta jiwa, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. “Tentu,nya apabila didorong dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, akan terus berdampak positif pada peningkatan produktivitas sektor manufaktur, dan akan terus memberikan kontribusi yang baik pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu beradaptasi dalam era Industri 4.0, Kemenperin terus mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui program-program utama, meliputi pendidikan vokasi berbasis kompetensi, pembangunan unit pendidikan dan pelatihan di wilayah pusat pertumbuhan industri, serta program link and match antara dunia pendidikan dengan industri. • dro